

LAPORAN KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2024

STASIUN KIPM GORONTALO





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala anugerah dan kasih-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024 dengan baik.

Laporan ini disusun bertujuan untuk menggambarkan kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan Kegiatan Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2024. Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi organisasi dalam menilai pencapaian tujuan, efisiensi proses kerja, dan kualitas yang dicapai, sekaligus untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, serta memberikan gambaran dan informasi atas capaian kinerja SKIPM Gorontalo Tahun 2024.

Kami sampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian target kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2024 dan penyusunan laporan kinerja ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga Laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk bagi kami dalam menilai apakah kinerja Organisasi kami telah memenuhi harapan atau tidak.



Kepala Stasiun KIPM Gorontalo

Abdul Kadir, S.Pi, M.Si



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis	3
1.4 Sistematika dan Penyajian	4
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 5
2.1 Visi dan Misi	5
2.2 Tujuan	5
2.3 Sasaran Strategis	6
2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja	8
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 12
3.1 Capaian Kinerja	12
3.2 Analisa dan Evaluasi	14
3.3 Realisasi Anggaran	38
 BAB IV PENUTUP	 39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Rekomendasi	39



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target SKIPM Gorontalo Tahun 2024.....	9
Tabel 2. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024.....	13
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.....	16
Tabel 4. Target dan Realisasi IK2 Persentase hasil kealutan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo ..	18
Tabel 5. Target dan Realisasi IK3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	19
Tabel 6. Target dan Realisasi IK14 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun media pembawa.....	21
Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layan public SKIPM Gorontalo.....	23
Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 Indeks Profesionalitas ASN.....	25
Tabel 9. Target dan Realisasi IK7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	28
Tabel 10. Target dan Realisasi IK8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	30
Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 Nilai IKPA.....	32
Tabel 12. Target dan Realisasi IK10 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo.....	33
Tabel 13. Target dan Realisasi IK11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	35
Tabel 14. Target dan Realisasi IK12 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa.....	36
Tabel 15. Target dan Realisasi IK12 Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN	37
Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Tahun 2024.....	38



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo.....	3
Gambar 2. Peta Strategis Stasiun KIPM Gorontalo.....	6
Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2024.....	12
Gambar 4. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 Stasiun KIPM Gorontalo	22
Gambar 5. Indeks Profesionalitas ASN Stasin KIPM Gorontalo Tahun 2024.....	25
Gambar 6. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 Stasiun KIPM Gorontalo.....	29
Gambar 7. Data Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024	31
Gambar 8. SIDAK Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024.....	34



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024
- Lampiran 2. Profil Pegawai Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024
- Lampiran 4. Sertifikat CPIB kapal Diterbitkan Tahun 2024
- Lampiran 5. Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2024
- Lampiran 6. Data Sertifikat Keterangan Hasil Surveilen (SKHS) Tahun 2024



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05 Tahun 2024 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasasn Mutu Hasil KElautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah salah satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam menajalankan tugasnya, BPPMHKP diwajibkan untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi serta memberikan gambaran tentang hasil dari capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. laporan ini merupakan instrumen pengendalian dan pendorong peningkatan kinerja, serta sebagai sarana untuk menerima masukan dari stakeholder guna perbaikan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKj) tidak hanya dilakukan untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, melainkan juga sebagai kewajiban sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengenai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan prosedur revisi terhadap laporan kinerja instansi pemerintah.

1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo berperan sebagai Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu dan kemanana hasil kelautan dan perikanan, penerapan system manajemen mutu dan pengawasan keamananhayati ikan pada Badan adan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.



Dalam rangka menjalankan tugasnya, Stasiun KIPM Gorontalo melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

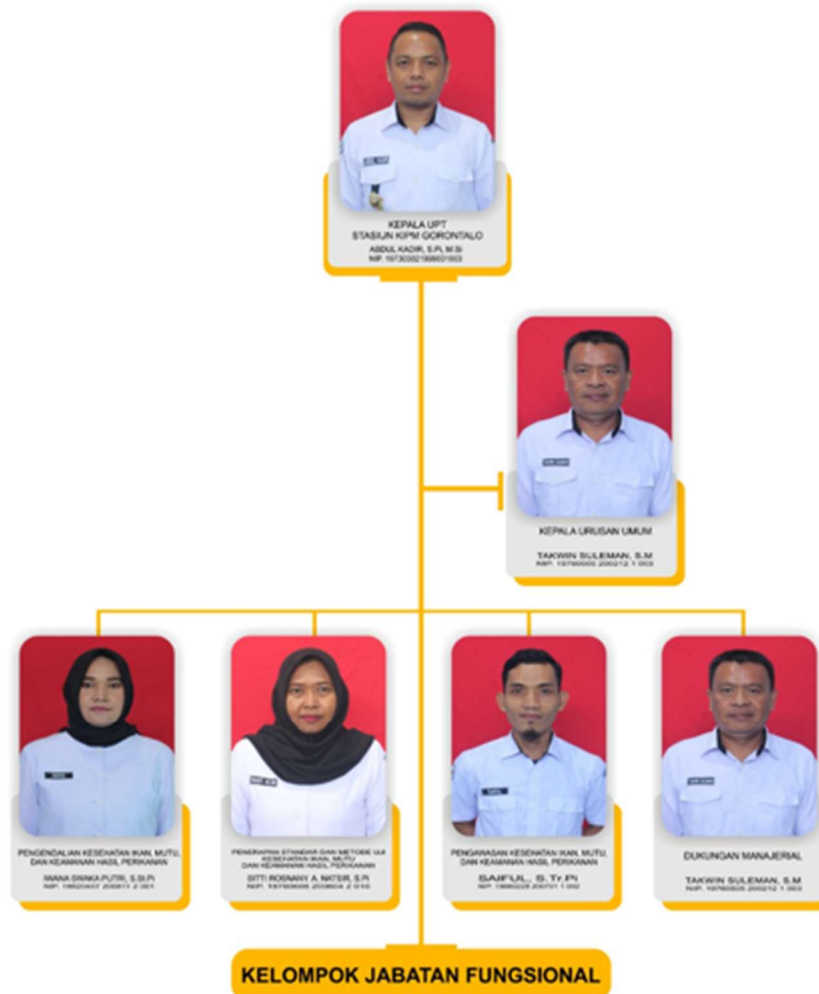
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala Stasiun KIPM Gorontalo membawahi 4 orang pejabat fungsional, 3 orang pegawai administrasi, dan 5 orang pegawai PPNP dan 5 Orang pegawai PJLP . Struktur organisasi melibatkan 1 (satu) Kepala Urusan Umum dan pejabat fungsional yang bertindak sebagai Ketua Tim Kerja . Adapun pejabat yang terlibat dalam Ketua Tim Kerja tersebut mencakup:

1. Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Inspektur Mutu Ahli Muda);
2. Ketua Tim Kerja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Inspektur Mutu Ahli Pertama)
3. Ketua Tim Kerja Penerapan Standard an Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Inspektur Mutu Ahli Muda)
4. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial (Kaur Umum)



STRUKTUR ORGANISASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA LINGKUP STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
GORONTALO



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo

1.3 Arah Kebijakan dan Isu Strategis

berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP KKP merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dibawahnya UPT Stasiun KIPM Gorontalo



yang bertugas untuk melakukan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dan kelautan, dimana dalam pelaksanaan peningkatan kualitas, keamanan dan ketersediaan hasil perikanan memiliki isu strategis antara lain :

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan pertumbuhan industri perikanan yang berdaya saing dan bernilai tambah;
3. Memberikan layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor;
4. Memberikan jaminan Kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan.

Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan;.
2. Koordinasi terkait akselerasi sertifikasi CPIB kapal dengan pelabuhan perikanan;
3. Dukungan program prioritas KKP, seperti surveilen untuk menilai konsistensi UPI dalam pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BPPMHKP.

1.4 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian Laporan Kinerja Tahun 2024 merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 Tahun 2023, sebagai berikut:

- a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- b. Bab II- Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
- d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024, penghargaan yang telah diraih atau dokumen lainnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi

Stasiun KIPM Gorontalo, sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), mengemban visi yang sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2020-2024. Visi ini didesain untuk mendukung visi Presiden. **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”**

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP dan Unit Pelaksana Teknisnya (UPT) menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

2.2 Tujuan

Penerapan tujuan pembangunan Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah manifestasi dari visi dan misi untuk mendukung prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan

Dalam Rencana Strategis Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 2020-2024, terdapat empat tujuan yang telah ditetapkan yang sejalan dengan upaya pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Gorontalo bertanggung jawab untuk mencapai keempat tujuan tersebut sesuai dengan mandatnya, yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan mutu hasil perikanan serta keamanan hayati ikan sebagai Upaya Tindakan perlindungan terhadap Kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.



2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu dan hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Gorontalo

2.3 Sasaran Strategis

Sasaran merupakan gambaran yang menjadi potret dalam pencapaian tujuan dan mencerminkan pencapaian atau hasil yang diharapkan oleh suatu lembaga dalam periode waktu tertentu. Dengan menetapkan sasaran, lembaga dapat memfokuskan perencanaan program dan kegiatannya dengan cara yang spesifik, terinci, dapat diukur secara kuantitatif, dan layak diupayakan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.



Gambar 2. Peta Strategis SKIPM Gorontbalo

Peta Strategi adalah sebuah dashboard yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.



Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan telah tersusun yang berisi tentang sasaran kegiatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan. Indikator kinerjanya adalah
 - Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Gorontalo
 - Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup SKIPM Gorontalo
 - Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
2. Terselenggaranya pengendalian system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Indikator kinerjanya adalah : nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.
3. Terselenggarayanya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Gorontalo . Indikator kinerjanya adalah :
 - Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
 - Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Gorontalo
 - Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo
 - Nilai IKPA lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
 - Presentasi Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
 - Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo
 - Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Gorontalo
 - Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Gorontalo

Berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan untuk periode 2020-2024, Stasiun KIPM Gorontalo, sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP, menetapkan sasaran strategis yang dapat mencapai hasil yang diinginkan dari program-program yang sedang dilaksanakan. Sasaran tersebut diarahkan pada pencapaian dalam periode yang lebih singkat,



khususnya pada tahun 2024. Sasaran ini diformulasikan dalam bentuk kuantitatif, memungkinkan pengukuran, serta memiliki kriteria yang jelas. Sasaran ini dirancang dengan makna yang terkandung, didasari oleh logika rasional, menantang, bersifat spesifik, dan memiliki konsistensi yang saling mendukung satu sama lain.

2.4 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran merupakan hasil yang akan diperoleh secara nyata oleh instansi pemerintah dengan merinci secara lebih spesifik dan terukur, dalam jangka waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan tujuan umum. Dalam penetapan sasaran, telah diidentifikasi indikator sasaran sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang direncanakan pada tahun tertentu. Tiap indikator sasaran dilengkapi dengan rencana tingkat pencapaian (target) masing-masing. Upaya dilakukan agar sasaran dapat tercapai secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam rencana strategis. Oleh karena itu, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang dapat diukur. Indikator Kinerja Kegiatan digunakan sebagai alat ukur yang menunjukkan keberhasilan pencapaian hasil (output) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara khusus untuk menilai pencapaian kinerja yang terkait dengan sasaran kegiatan (output). Dalam konteks Struktur Manajemen Kinerja di BKIPM, Indikator Kinerja Kegiatan merupakan target kinerja kegiatan yang memiliki keterkaitan akuntabilitas dengan unit organisasi setingkat Eselon II.

Berdasarkan sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya pada level eselon II lingkup BKIPM, maka ditetapkan target kinerja yang akan dicapai Stasiun KIPM Gorontalo pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Target Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	99
SK.2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	3,36
		6	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	86
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	82
		8	Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	71
		9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	93,76
		10	Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100



		11	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80
		12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80
		13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80

Penetapan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) melibatkan proses perhitungan berdasarkan data target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah terdokumentasi. Dengan membandingkan angka target dan hasil aktual IKU, kita dapat menghitung indeks pencapaian IKU. Dalam perhitungan ini, perlu mempertimbangkan jenis polarisasi IKU yang mungkin ada, seperti maximize, minimize, dan stabilize. Aturan dalam menentukan indeks pencapaian IKU harus diikuti sesuai dengan karakteristik masing-masing polarisasi.

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggidari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b. Polarisasi Minimize

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecildari target, dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \{(1 + (1-\text{Realisasi/Target}))\} \times 100\%$$

c. Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suaturentang tertentu dibandingkan target



4. Status index capaian IKU adalah sebagai berikut :





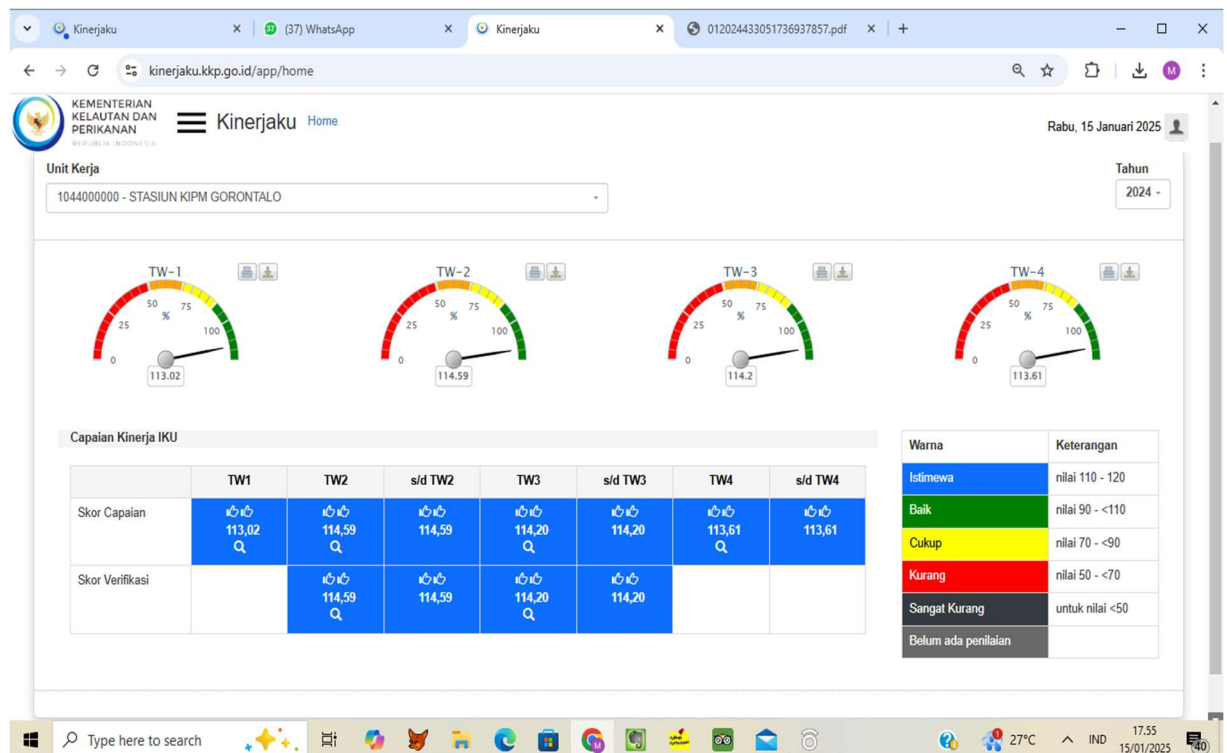
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Penilaian Pencapaian kinerja dilakukan melalui tahapan pengukuran pencapaian indikator dan analisis hasil capaian indikator. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator dan target yang telah disepakati sebelumnya.

Capaian kinerja SKIPM Gorontalo pada Tahun 2024 sudah istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar TW IV sebesar 113,61 berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 3. Nilai Kinerja Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun Anggaran 2024



Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Tahun 2024.

Rekapitulasi capaian kinerja BKIPM Gorontalo pada Tahun 2024 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Capaian Kinerja BKIPM Gorontalo Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TRIWULAN IV		
			TARGET	REALISASI	%
SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70	100	120
	2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70	100	120
	3	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	99	100	101,01
SK.2 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratoium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70	83,10	118,71
SK.3 Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo	5	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	3,36	3,593	106,85



6	Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo.(indeks)	86	87,08	101,26
7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	82	82,60	100,73
8	Nilai Kinerja perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	71	100	120
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	93,76	96,60	103,03
10	Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100	100	100
11	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80	100	120
12	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80	84,34	105,43
13	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80	97,50	120

3.2 Analisa dan Evaluasi

Evaluasi kinerja sasaran kegiatan dilakukan dengan merinci pencapaian pada setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penilaian capaian ini didasarkan pada perbandingan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran yang sedang berjalan.

Sasaran Kegiatan dan Indikator Utama



Sasaran Kegiatan yang akan dicapai oleh SKIPM Gorontalo terbagi menjadi 3 kegiatan :

1) Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan yang terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2024 mengatur pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. BPPMHKP akan meluncurkan 2 jenis sertifikasi, yakni sertifikasi mutu produksi primer dan sertifikasi mutu pasca panen

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Untuk menghasilkan produk kelautan dan perikanan yang aman dan berkualitas, Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian sejak tahap awal produksi (pra produksi) hingga pemasaran. Penerapan sistem ini merupakan kunci untuk memenuhi standar mutu dan keamanan pangan. Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Hasil inspeksi baik melalui sistem OSS maupun secara langsung menghasilkan rekomendasi perbaikan.

Pada Tahun 2024 ini telah terealisasi sebesar 100% dari target 70, realisasi ini sesuai dengan tabel 3



Tabel 3 Target dan Realisasi IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.

IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	-	-	70	100	120	70	120

Keberhasilan mencapai 100% dari target 70% pada tahun 2024 dalam hal persentase hasil kelautan dan perikanan sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, dapat dianalisis dari beberapa faktor kunci seperti efektivitas system jaminan mutu dan kemandirian hasil kelautan dan perikanan yang komprehensif dan efektif, kemudian dengan pengawasan dan inspeksi yang ketat serta keterlibatan dan kesadaran pelaku usaha perikanan.



IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.

Kinerja Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi sertifikasi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar dan telah menjadi kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SJM KHP) merupakan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sektor produksi Pasca Panen merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian standar mutu dan keamanan pangan pada sektor pasca panen melalui beberapa faktor berupa efektivitas sistem jaminan mutu dan keamanan yang telah efektif secara konsisten mencegah dan mengendalikan potensi bahaya (hazard) pada setiap tahapan serta pemantauan dan pengawasan yang ketat dari otoritas kompeten dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang telah ditetapkan.

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo. Pada tahun 2024 telah melebihi dari target yang ditetapkan. Yaitu 100% dari target 70%



Tabel 4 Target dan Realisasi IK2 **Persentase hasil kealutan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.**

IK2 Persentase hasil kealutan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	-	-	70	100	120	70	120

IK3. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.

Rasio penerimaan ekspor ikan dan hasil perikanan menunjukkan seberapa banyak produk bersertifikat (jumlah HC terbit) yang diterima oleh negara importir, dibandingkan dengan jumlah total ekspor dan jumlah penolakan (HC ditolak) yang terjadi.



Ekspor ikan dan hasil perikanan yang sukses menunjukkan kepatuhan terhadap standar mutu dan keamanan, tanpa penolakan dari negara importir. Rasio ini penting untuk menilai kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian, terutama dalam perdagangan internasional

Sertifikat Kesehatan (HC) menyatakan bahwa produk perikanan aman dikonsumsi. Sedangkan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan menjadi bukti bahwa pengiriman produk telah memenuhi semua persyaratan

Pada tahun 2024 rasio ekspor telah melebihi dari target yang ditetapkan. Yaitu mencapai 100% dari target 99% sehingga bisa mencapai 101,01 %

Tabel 5 Target dan Realisasi IK3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.

IK3 Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo.								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	-	-	99	100	101,01	99	101,01-



2.) Kegiatan Manajemen Mutu

Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan system jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan yang konsisten sesuai standar yang terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja :

IK4. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo

Laboratorium penguji dan lembaga inspeksi perlu meningkatkan nilai manajemen mutu mereka. Penilaian ini berdasarkan evaluasi kepatuhan terhadap standar mutu ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020, dinyatakan dalam persentase kesesuaian dengan kriteria standar. Skor tinggi menunjukkan kepatuhan yang baik.

laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem. ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Penilaian Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang menjadi aspek utamam melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen



ISO/IEC 17020 adalah standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk kompetensi Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non-teknis. Tujuan standar ini adalah untuk memastikan bahwa Lembaga Inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif, dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 6 Target dan Realisasi IK4 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo

IK4 Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	-	-	70	83,10	118,71	70	118,71



4.) Dukungan manajemen internal lingkup BKIM

Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik yang terdiri dari 9 (Sembilan) indikator kinerja :

IK5. Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public SKIPM

Metode pengumpulan data survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh Stasiun KIPM Gorontalo ditentukan berdasarkan jenis permohonan layanan jasa/publik yang didapatkan oleh responden/pelanggan. Responden akan menerima barcode atau alamat link pengisian formulir kuisisioner SKM secara online melalui aplikasi Si Susan KKP di <https://ptsp.kkp.gi.id/skm/s/u/59>.

Metode pengumpulan data ini dapat dikategorikan sebagai **survei online** atau **survei berbasis web**, dimana responden mengisi kuisisioner secara mandiri melalui platform online. Daftar pertanyaan survei mencakup 9 aspek, termasuk Persyaratan, Sistem, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Spesifikasi Produk, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, dan Sarana. Nilai IKM diperoleh dari rata-rata skor total dari hasil kuesioner yang diisi oleh masyarakat untuk UPT BPPMHKP.



Gambar 4. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024



Pada Tahun 2024 Stasiun KIPM Gorontalo telah melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap layanan publik SKIPM dengan hasil yang positif, mencapai 115,74%.

Analisis Keberhasilan dalam Survei Kepuasan Masyarakat Stasiun KIPM Gorontalo tahun 2024 dipengaruhi oleh faktor berupa penerapan metode pengumpulan data online melalui aplikasi Si Susun KKP yang telah memberikan efisiensi dan jangkauan yang luas dan kuesioner yang komprehensif mencakup 9 aspek sehingga dapat membentrikan gambaran menyeluruh terhadap kepuasan Masyarakat.

Tabel 7 Target dan Realisasi IK5 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layan public SKIPM Gorontalo

IK5 Nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layan public SKIPMGorontalo								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	-	84	3,36	3,539	106,93	3,36	106,93



IK6. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan alat ukur yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN, baik secara individu maupun kelompok, dalam suatu organisasi pemerintahan. Melalui IP ASN, kita dapat menilai seberapa jauh ASN mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai motor penggerak penyelenggaraan negara. Dengan mengukur dan meningkatkan profesionalitas ASN, kita dapat memastikan bahwa ASN mampu menjalankan tugasnya dengan baik, memberikan pelayanan publik yang optimal, dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Pembinaan dan pengembangan ASN yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Profesionalisme pegawai dalam sebuah organisasi sangat ditentukan oleh tingkat pelaksanaan tugas yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan. Sedangkan profesional dalam pendekatan sistem merit mengandung persyaratan kompetensi (pengetahuan, keahlian, pengalaman), kualifikasi (pendidikan, pelatihan), kinerja (target, pencapaian), kompensasi (kebutuhan, external equity), dan disiplin. Berdasarkan hal tersebut, maka indikator yang digunakan untuk mengukur indeks profesionalitas ASN adalah kompetensi, kinerja, kompensasi, dan disiplin, dengan rumus matematis sebagai berikut $IdxPro = koef(1 - gaps) + Koef(Kj) + Koef(1 - \delta SI(inex)) + Koef(1 - inDiscpl)$

Keterangan: Gaps : Persentase ASN yang tidak kompeten Kj : Angka SKP δSI : Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama (%), inDiscpl : Jumlah pelanggaran disiplin. Pada kenyataannya sering terjadi teori yang dibangun sudah sangat baik, namun data yang dibutuhkan kurang tersedia. Ketidaktersediaan data dapat terjadi secara permanen dimana data belum dikumpulkan secara parsial seperti tidak tersedia pada setiap tahun, atau waktu pengambilan data tidak sesuai dengan harapan. Ketidaktersediaan data permanen dapat diatasi melalui penggunaan data proxy dengan memperhatikan data-data sejenis atau data yang berhubungan dengan output sebagaimana diharapkan. Penggunaan data proxy dapat menyebabkan tingkat validitas berkurang karena terjadi deviasi, namun demikian deviasinya sudah dapat diperkirakan sebelumnya sehingga nilai validitas masih dapat dipertanggungjawabkan.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan upaya penting untuk menilai kualitas ASN dan mendorong peningkatan kinerja mereka. Namun, terdapat tantangan yang perlu diatasi,



yaitu **ketidaktersediaan data yang parsial**. Ketiadaan data yang lengkap dapat menyebabkan indeks komposit yang dibangun menjadi kurang reliabel. Hal ini karena nilai yang diperoleh dari data yang kosong dikalikan dengan koefisien yang telah ditetapkan, sehingga hasil penghitungan mengalami deviasi menjauh dari nilai validitas yang diharapkan. Ketidaktersediaan data yang parsial merupakan tantangan serius dalam pengukuran IP ASN. Data yang tidak lengkap dapat menyebabkan indeks komposit menjadi tidak reliabel dan tidak dapat mencerminkan tingkat profesionalitas ASN secara akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah data parsial agar pengukuran IP ASN dapat dilakukan secara efektif dan menghasilkan data yang akurat dan relevan. Adapun data-data yang dapat digunakan untuk menghitung indeks profesionalitas ASN berasal dari sumber yang tervalidasi, seperti; Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), Pendataan Ulang PNS (e- PUPNS), pemetaan PNS, daftar gaji dan tunjangan PNS, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan data hukuman pegawai.



The screenshot shows the 'IP ASN 2024' web application. At the top, there is a navigation bar with links: Dashboard, Eselon, Pegawai, FAQ, and IP ASN 2023. Below the navigation bar, there is a search bar with the text 'gorontalo' and a 'Cari' button. The main content area displays a table with the following data:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STASIUN KIPM GORONTALO	10	20.7	82.8 %	36.38	90.95 %	25	83.33 %	5	100 %	87.08	TINGGI

Below the table, there are navigation buttons: '<', '>', and '>'.

Gambar 5. Indeks Profesionalitas ASN Stasin KIPM Gorontalo Tahun 2024 (Sumber : <http://ropeg.kkp.go.id>)

Data kompetensi seharusnya berasal dari data e-PUPNS yang cukup lengkap mengenai pendidikan, pengalaman, dan pelatihan dari tiap-tiap individu. Hanya saja data ini bukan bersifat kompetensi, melainkan potensi. Potensi meskipun tidak sepenuhnya mewakili dan dapat menjadi data proxy untuk kompetensi. Dengan demikian premis berubah bahwa semakin profesional pegawai apabila semakin sesuai dengan potensinya. Data kinerja yang berasal dari SKP diasumsikan semakin tinggi nilai SKP, maka akan semakin profesional seseorang pegawai. Meskipun data SKP telah tersedia dengan lengkap, walaupun substansi kinerja itu sendiri masih memerlukan perbaikan namun dapat digunakan. Data gaji atau kompensasi untuk mengukur tingkat profesionalitas pegawai dapat



didekati dengan pemberian kompensasi yang sesuai dengan beban kerja dan risiko, baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan data organisasi yang modern bisa digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan seorang pegawai dalam bekerja dengan cara dilakukan proxy, dimana seorang pegawai dinilai semakin profesional apabila tingkat pelanggarannya semakin rendah. Untuk membangun pegawai yang bersih dan profesional kegiatan yang dilakukan adalah menegakkan integritas. Pada Tahun 2024 capaian realisasi sebesar 105,31 % dengan realisasi 88,46 dari target 84

Analisis capaian realisasi peningkatan integritas ASN pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor berupa kombinasi strategi dan program yang efektif, peningkatan sistem pengawasan, dukungan dan komitmen dari berbagai pihak, serta penggunaan data dan analisis yang efektif. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berkontribusi pada keberhasilan ini dan untuk memastikan keberlanjutannya di masa mendatang.

Tabel 8 Target dan Realisasi IK6 Indeks Profesionalitas ASN

IK6 Indeks Profesionalitas ASN								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
60	72	73	83	84	88,46	105,31	76	116,4



IK7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) merekomendasikan peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih akurat dalam menggambarkan kinerja unit kerja. Rekomendasi tersebut menekankan pentingnya tindak lanjut dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan dalam perencanaan kinerja, manajemen kinerja, dan pencapaian kinerja unit kerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem manajemen kinerja di sektor publik yang selaras dengan reformasi birokrasi. SAKIP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian *outcomes* (hasil) pemerintahan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan untuk memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja SAKIP.

Evaluasi SAKIP tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014, yang mencakup rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Realisasi tahun 2024 mencapai 82,60 dari target 82 atau 100,73%.

Keberhasilan evaluasi SAKIP tahun 2024 yang mencapai realisasi 82,60 dari target 82 dengan persentase 100,73% adalah hasil dari sinergi berbagai faktor, termasuk penerapan kebijakan yang jelas, dukungan pimpinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan data yang efektif, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai umpan balik. Dengan terus memperkuat elemen-elemen ini, instansi pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja dan mencapai hasil yang lebih baik dalam pengelolaan kinerja publik.

**Tabel 9** Target dan Realisasi IK7 **Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo**

IK7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	% REALISASI TERHADAP TARGET
85	85	85	93,93	82	82,60	100,73	81	101,97

IK8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai kinerja anggaran adalah proses yang menghasilkan nilai capaian kinerja untuk setiap indikator dengan membandingkan data realisasi terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. Penting untuk memastikan integrasi yang baik antara sistem web berbasis MONEV/SMART Kementerian Keuangan dan penerapan aplikasi SAKTI. Keselarasan antara semua pengguna aplikasi SAKTI diperlukan agar data yang dihasilkan sesuai dengan target dan timeline yang diharapkan.

Meningkatkan nilai kinerja anggaran memerlukan integrasi yang efektif antara berbagai sistem dan aplikasi, serta keselarasan di antara semua pengguna. Dengan melakukan perbandingan antara data realisasi dan target, melakukan kontrol berkala, serta memastikan adanya sosialisasi dan



pelatihan yang memadai, capaian realisasi anggaran dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Ini akan berkontribusi pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik

MONEV STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Role Pilih TA (2024) Logout

NK Perencanaan Satuan Kerja Monitoring / NK Perencanaan Satker

Download Excel

Tampilkan 10 entri Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	648678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00	

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 6. Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 Stasiun KIPM Gorontalo (Sumber : Aplikasi Smart Kemenkeu)

Pencapaian realisasi kinerja anggaran sebesar 120% merupakan hasil dari sinergi beberapa faktor, termasuk integrasi sistem yang efektif, monitoring dan kontrol yang rutin, sosialisasi dan pelatihan yang memadai, serta dukungan kepemimpinan yang kuat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, instansi pemerintah dapat mencapai hasil yang luar biasa dalam pengelolaan anggaran publik, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap langkahnya.

Realisasi indikator pada tahun 2024 ini mencapai 120 % atau nilai realisasi 100 dari nilai target 71 sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 10 Target dan Realisasi IK8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

IK8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	-	-	71	100	120	71	120

IK9. Nilai IKPA

IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari berbagai aspek, termasuk kesesuaian dengan perencanaan, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Dengan menggunakan aplikasi OMSPAN dan mengikuti ketentuan dalam PMK No. 195/2018, Satuan Kerja dapat memastikan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan serta regulasi yang berlaku. Evaluasi yang berkualitas melalui IKPA akan berkontribusi pada perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan anggaran publik.. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pengukuran kualitas kinerja menggunakan IKPA, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/2018.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I GORONTALO

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total Konversi Bobot)
						Revisi DPA	Deviasi Halaman III DPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Capaian Output				
1	050	032	640678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	83.45	97.50	100.00	100.00	95.83	100.00	96.60	100%	0.00	96.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	19.50	10.00	10.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	91.73			95.33			100.00				

Gambar 7. Data Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024 Nilai IKPA mendapatkan realisasi nilai 96,60 dari target 93,76 dengan persentase 103,03%.

Keberhasilan pencapaian nilai IKPA di atas target pada tahun 2024 merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait. Kombinasi dari pemahaman dan penerapan PMK No. 195/2018, pemanfaatan OMSPAN yang efektif, perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta komitmen dan kerja sama tim, berkontribusi pada keberhasilan ini. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan komitmen yang kuat, pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien, menghasilkan kinerja yang optimal.

**Tabel 11** Target dan Realisasi IK9 Nilai IKPA

IK9 Nilai IKPA								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
82	85	89	96,62	93,75	96,62	103,06	90	107,35

IK10. Penyelesaian temuan BPK ingkup SKIPM Gorontalo

Nilai temuan yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan pernyataan profesional dari pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Penilaian ini didasarkan pada empat kriteria utama yang menjadi acuan dalam evaluasi laporan keuangan, yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam LHP BPK memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Dengan mempertimbangkan keempat kriteria tersebut, LHP BPK berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Keberhasilan dalam memenuhi kriteria ini tidak hanya mencerminkan praktik pengelolaan keuangan yang baik, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada publik dan pemangku kepentingan terhadap integritas laporan keuangan yang disajikan.



Pada Tahun 2024 realisasi mencapai 100 dari target 100 sehingga mencapai 100 persen sebagaimana tabel 11

Keberhasil meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yang tercermin dalam laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Hal ini juga menunjukkan komitmen BPPMHKP dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik."

Tabel 12 Target dan Realisasi IK10 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPM Gorontalo

IK10 Presentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup SKIPMGorontalo								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	100	100	100	100	100	100	100

IK11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

Pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) bertujuan untuk memverifikasi data, menilai bukti penyelesaian temuan (seperti sanksi dan pengembalian uang negara), dan menetapkan status penyelesaian (selesai, proses, atau belum ditindaklanjuti). Kecepatan penyelesaian sangat krusial untuk mencegah potensi masalah hukum. Penting juga untuk memperkuat sistem pengendalian internal di setiap satuan kerja (Satker) agar

temuan tidak berulang dan penyelesaiannya lebih cepat.

Pemantauan tindak lanjut sendiri secara khusus bertujuan: 1) melakukan rekonsiliasi atadan informasi pemantauan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan Satker Lingkup usatdanTmenilai kecukupan dan validitas bukti tindak lanjut yang disampaikan (antara lain: surat teguran/sanksi, setoran ke kas negara, dsb), dan 3) memberikan status penyelesaian tindak lanjut temuan Itjen KKP (Tuntas, Proses, Belum Ditindaklanjuti) atas bukti tindak lanjut yang disampaikan. Kepedulian tindak lanjut ini sangat penting mengingat semakin berlarut-larut penyelesaian akan berpotensi masuknya APH. Diperlukan juga peningkatan sistem pengendalian intern di masing-masing Satker sebagai lapis1 dan 2 dalam Three Lines of Defense sehingga temuan tidak terus berulang dan berlarut-larut penyelesaiannya.

 SIDAK KKP ELYZAL ZABET, S.E PENGAWASAN BERANDA MANAGE TLHP TUTORIAL	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TANJUNG BALAI ASAHAN STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%
	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAIU-BAIU STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUNA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BIMA STATUS: SUKSES / PROGRES: 100.00%

Gambar 8. SIDAK Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024

Berdasarkan data SIDAK Inspektorat KKP, SKIPM Gorontalo telah melaksanakan penyelesaian tindaklanjuti temuan Itjen dengan status **tuntas** realisasi 100 dari target 75 dengan prosentasi 120 %.



Tabel 13 Target dan Realisasi IK11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja

IK11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
100	100	100	100	75	100	120	90	111,1

Keberhasilan SKIPM Gorontalo dalam menyelesaikan tindak lanjut temuan Itjen KKP dengan realisasi 100% (melebihi target 75% atau 120% dari target) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap keberhasilan ini antara lain: komitmen dan kepemimpinan SKIPM Gorontalo memberikan prioritas tinggi pada penyelesaian temuan Itjen KKP dan merespon temuan itjen secara proaktif dan cepat dengan mengambil Langkah korektif dan preventif untuk mengatasi akar permasalahan yang ditemukan.

IK12. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa

Kepatuhan unit eselon I dalam pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan empat aspek: pengunggahan rencana pengadaan ke SIRUP, penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk belanja modal, pelaporan pengadaan, dan kesesuaian tahapan pelaksanaan pengadaan.

Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa



unsur berikut:

Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP(20%)

Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).

Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Unit Eselon I pada tahun 2023 yang mencapai 100,98% dengan nilai realisasi 78,26 dari target 77,50

Keberhasilan pencapaian yang luar biasa didasari pada beberapa factor diantaranya komitmen kepemimpinan di unit eselon 1 telah memberikan prioritas tinggi pada kepatuhan pengadaan barang dan jasa serta penggunaan aplikasi SPSE dan SIRUP yang optimal untuk meningkatkan transparansi dan efisien dan akuntabilitas.

Tabel 14 Target dan Realisasi IK12 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa

IK22 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	-	78,26	77,50	78,26	100,98	75	104,34

**IK13. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN**

Ukuran tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 10%); modal hingga triwulan 4 tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
2. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2023 (bobot 20%);
3. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
4. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Tahun 2024 telah terrealisasi 100 dari nilai target 77,50 atau sebesar 120%. Capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN SKIPM Gorontalo tahun 2024 yang mencapai 120% terrealisasi 100 dari nilai target 77,50,

Tabel 15 Target dan Realisasi IK13 Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN

IK13 Tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN								
REALISASI TAHUN 2020 - 2023				TARGET DAN REALISASI TAHUN 2024			RENSTRA 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	TARGET	REALISASI	% REALISASI TERHADAP TARGET	TARGET	%
-	-	-	100	77,50	100	120	75	133,3

Capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BPPMHKP tahun 2024 menunjukkan kinerja



yang sangat baik dan jauh melampaui ekspektasi. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada keberhasilan ini: komitmen dan kepemimpinan yang kuat telah mengarahkan dan memotivasi seluruh tim untuk pengelolaan BMN yang baik dan handal dan perencanaan kebutuhan BMN (RKBMN) yang terstruktur dan realistis telah memastikan bahwa pengadaan dan pemanfaatan BMN sesuai dengan kebutuhan dan rencana kerja.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran SKIPM Gorontalo pada tahun anggaran (T.A) 2024 adalah sebesar Rp. 3.857.942.000 Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo pada tahun 2024 mencapai 3.808.260.817 atau sebesar 98,71%. terdapat anggaran blokir sebagai kebijakan efisiensi penghematan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp. 30.658.000

Realisasi penyerapan anggaran SKIPM Gorontalo T.A 2024 berdasarkan jenis kegiatan dan jenis belanja disajikan pada Tabel 16

Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Tahun 2024

No	KODE	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	RAELISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	3987	Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP	3.518.442.000	3.499.821.133	99,47
2	3989	Pengendalian Mutu	195.000,000	174.459.542	89,47
3	7010	Manajemen Mutu	144.500.000	133.980.142	92,72
		TOTAL	3.857.942.000	3.808.260.817	98,71



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun KIPM Gorontalo tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan LKj juga merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Gorontalo disusun berdasarkan pada pengukuran kinerja, evaluasi serta pengukuran (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas meningkatkan kinerja.

Akhirnya, Laporan Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2023 akan menjadi bentuk tanggung jawab tertulis kepada pihak yang memberikan kewenangan serta menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, sehingga dapat memperkuat prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu, diharapkan bahwa laporan kinerja ini juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Operasional, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran, dan Rencana Strategis pada masa yang akan datang.

4.2 REKOMENDASI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja SKIPM Gorontalo berdasarkan analisis capaian kinerja dan evaluasi yang telah dilakukan dan telah dituangkan dalam rekomendasi yang harapannya bisa meningkatkan pengawasan dan pengendalian mutu SKIPM Gorontalo :



1. Melakukan Peningkatan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pelatihan secara berkala agar tidak terjadi gap kompetensi SDM serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi secara rutin atas kompetensi SDM yang dimiliki
2. Meningkatkan system informasi manajemen yang mendukung pengawasan dan pengendalian serta integrasi data yang memungkinkan analisis real time serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi layanan dan melakukan pengaduan.
3. Melaksanakan survey kepuasan Masyarakat secara rutin untuk mendapatkan masukan yang konstruktif mengenai pelayanan dan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki
4. Kembangkan mekanisme yang efektif untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan audit serta memastikan setiap temuan ditindaklanjuti secara tepat waktu.

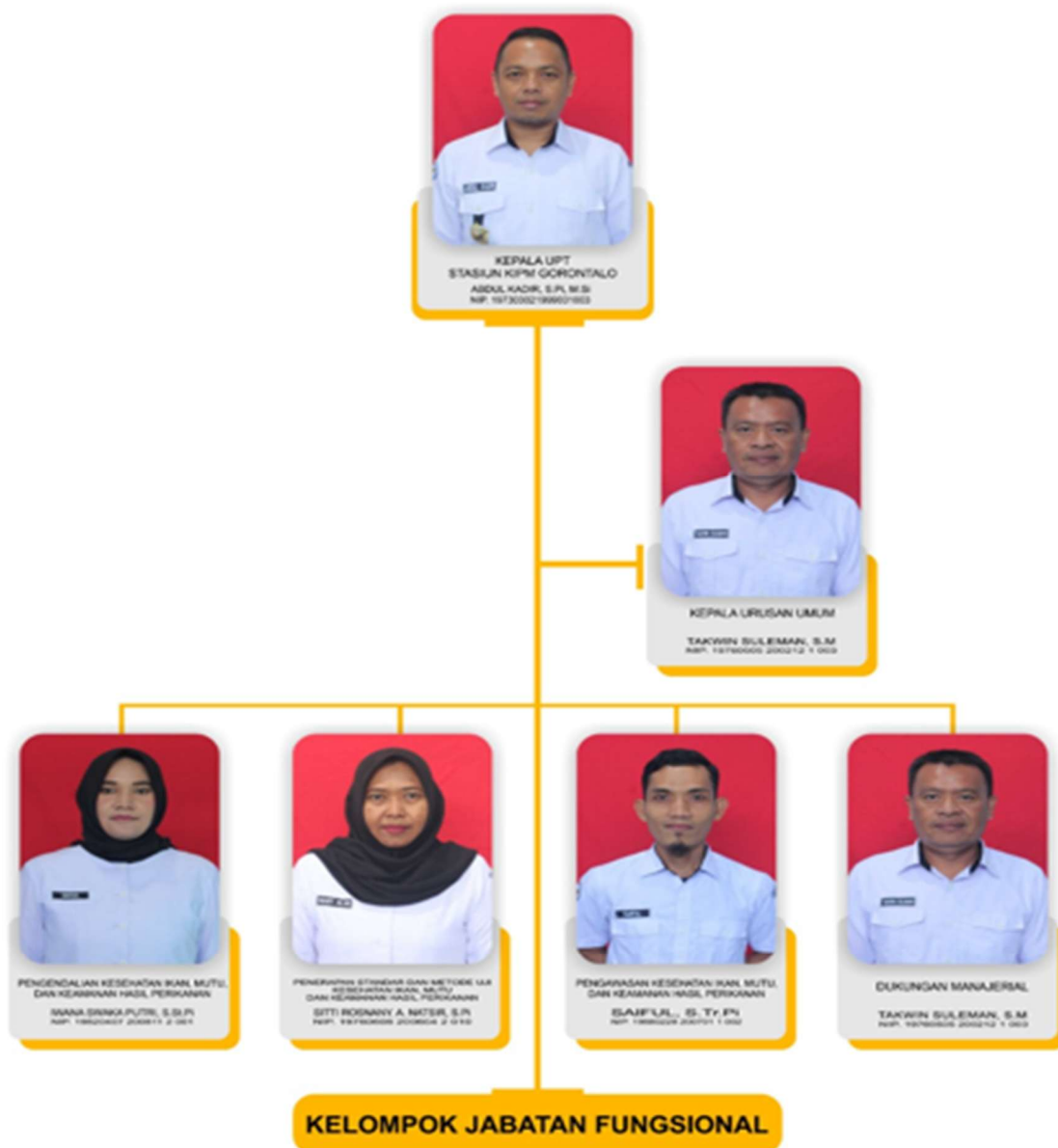
LAMPIRAN



Lampiran 1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024

STRUKTUR ORGANISASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA LINGKUP STASIUN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
GORONTALO

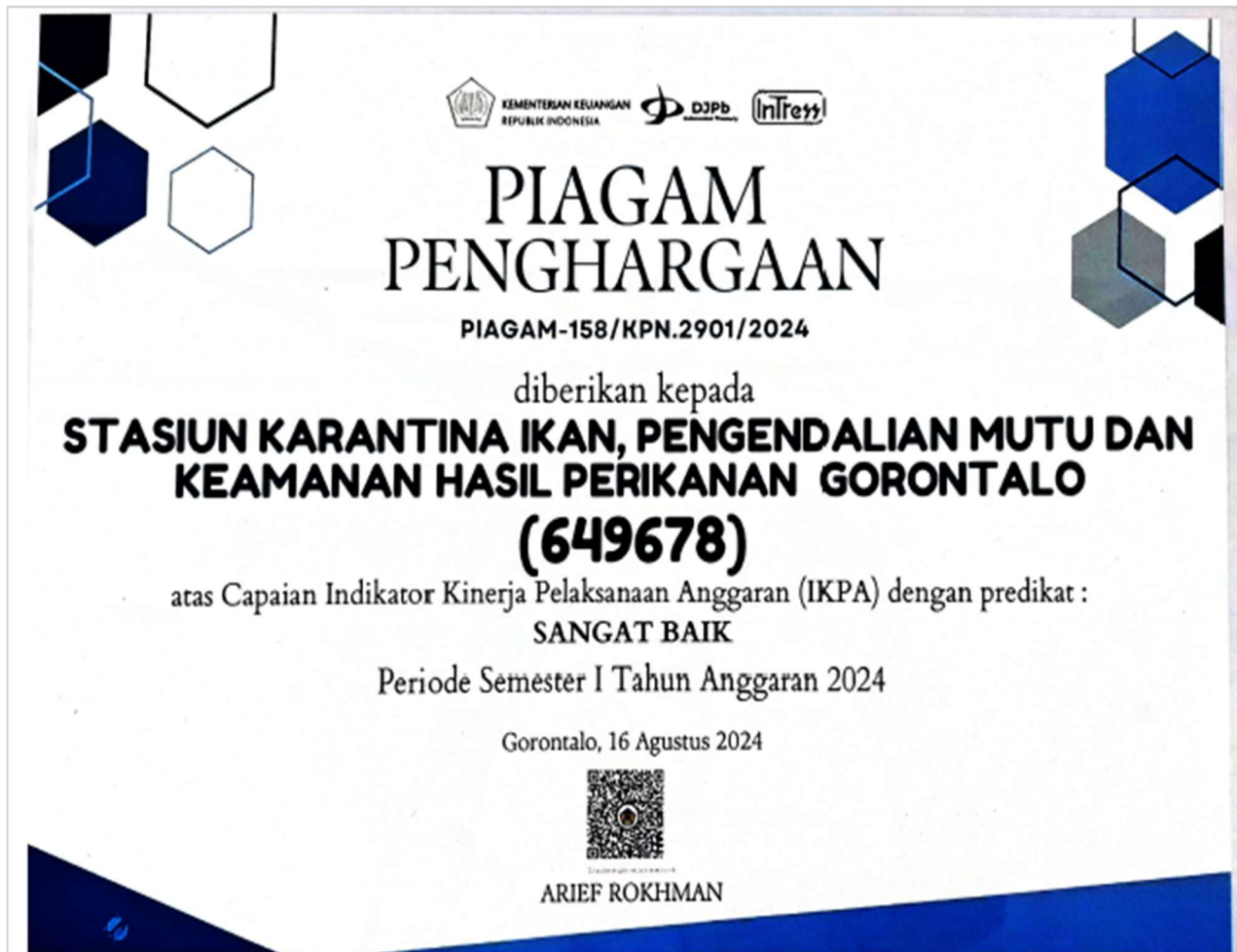


**Lampiran 2.** Profil Pegawai Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024

NO	JABATAN	PANGKAT	JUMLAH PEGAWAI
1	KEPALA UPT	IV A	1
2	KEPALA URUSAN UMUM	III B	1
3	INSPEKTUR MUTU AHLI MUDA	III D	2
4	INSPEKTUR AHLI PERTAMA	IIIb	2
5	ARSIPARIS MAHIR	IIIb	1
6	BENDAHARA	II d	1
7	PENGELOLA PERSURATAN	II D	1
8	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	IIIb	1
9	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	IIIb	1
15	PPNPN	-	5
16	PJLP	-	5



Lampiran 3. Penghargaan Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024





Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Gorontalo Tahun 2024



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN GORONTALO**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Abdul Kadir**
Jabatan : Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Gorontalo

Abdul Kadir



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN GORONTALO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK. 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
		3.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	99
SK. 2	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga Inspeksi lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	70
SK. 3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo	5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	3,36
		6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Indeks)	86
		7.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	82
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	71
		9.	Nilai Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	93,76
		10.	Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100
		11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80
		12.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80
		13.	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80



Data Anggaran

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	195.000.000
2.	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	144.500.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	3.428.094.000
Total Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo Tahun 2024		3.767.594.000

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama
Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Gorontalo

Abdul Kadir



Lampiran 4. Sertifikat CPIB kapal yang Diterbitkan Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240029

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> Fishing Vessel	: KM. Gorontalo 14
<u>Alamat</u> Address	: Jl. Trans Sulawesi, RT. 000/RW.000, Desa Huangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
<u>Ukuran Kapal</u> Size of fishing vessel	: 8 GT
<u>Tipe Kapal</u> Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
<u>Tanggal Inspeksi</u> Inspection date	: 8 Desember 2024 8 December 2024
<u>Jenis Produk</u> Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
<u>Pemeriksaan</u> Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

<u>Dikeluarkan di</u> Issued in	: Jakarta
<u>Pada tanggal</u> Date	: 19 Desember 2024 19 December 2024
<u>Berlaku sampai</u> Valid until	: 19 Desember 2026 19 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA


Ir. Ishartini





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240040

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> Fishing Vessel	: KM. Andra Jaya
<u>Alamat</u> Address	: Dusun Barat, Desa/Kelurahan Bongo, Kec. Batudaa Pantal, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
<u>Ukuran Kapal</u> Size of fishing vessel	: 8 GT
<u>Tipe Kapal</u> Type of fishing vessel	: <u>Kapal Penangkap</u> Fishing Vessel
<u>Tanggal Inspeksi</u> Inspection date	: <u>8 Desember 2024</u> 8 December 2024
<u>Jenis Produk</u> Commodity	: <u>Tuna Segar</u> Fresh Tuna
<u>Pemeriksaan</u> Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

<u>Dikeluarkan di</u> Issued in	: Jakarta
<u>Pada tanggal</u> Date	: <u>23 Desember 2024</u> 23 December 2024
<u>Berlaku sampai</u> Valid until	: <u>23 Desember 2026</u> 23 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240006

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Idaman 01
Alamat Address	: Dusun Mobingge, RT. 000/RW. 000, Desa Olibuu, Kec. Paguyaman Pantai, Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 15 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 23 November 2024 23 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: D

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 2 Desember 2024 2 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 2 Desember 2026 2 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240007

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Link Express
Alamat Address	: Tontayuo, RT. 000/RW. 000, Desa Langgula, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 8 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 23 November 2024 23 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: D

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 2 Desember 2024 2 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 2 Desember 2026 2 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240008

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Pandi Star
Alamat Address	: Jln. Batu Jajar, RT. 000/RW. 000, Kel. Tanjung Kramat, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 12 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 24 November 2024 24 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 2 Desember 2024 2 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 2 Desember 2026 2 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240009

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Nelayan 2017 882
Alamat Address	: Dusun Pentadu, RT. 000/RW. 000, Desa Biluhu Barat, Kec. Biluhu Barat, Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 13 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 25 November 2024 25 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 2 Desember 2024 2 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 2 Desember 2026 2 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240010

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Nelayan 2017 887
Alamat Address	: Jl. Botu Liodu, Komp. Tempat Pelelangan Ikan, RT.001/ RW.001, Kel. Tenda, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 13 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 25 November 2024 25 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: D

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 2 Desember 2024 2 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 2 Desember 2026 2 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240016

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Mina Karya Bahari
Alamat Address	: Dusun Tenga, RT. 000/RW. 000, Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantal, Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 12 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 28 November 2024 28 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Ikan Demersal Segar Fresh Demersal Fish
Pemeringkatan Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 5 Desember 2024 5 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 5 Desember 2026 5 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
*Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency*

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240017

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Nelayan 2017 957
Alamat Address	: Jln. Trans Sulawesi, Desa/Kelurahan Modelomo, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 25 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 28 Nopember 2024 28 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: D

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 6 Desember 2024 6 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 6 Desember 2026 6 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kepal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Reski Murni
Alamat Address	: Pambusuang, Desa/Kelurahan Pambusuang, Kec. Balanipa, Kab. Pilewali Mandar, Sulawesi Barat
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 5 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 29 Nopember 2024 29 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 6 Desember 2024 6 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 6 Desember 2026 6 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. Nelayan 2016 117
Alamat Address	: Dusun Pentadu, Desa/Kelurahan Biluhu Barat, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 13 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 29 November 2024 29 November 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 6 Desember 2024 6 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 6 Desember 2026 6 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

Kapal Perikanan Fishing Vessel	: KM. TMB Tongo 01
Alamat Address	: Dusun Barat, Desa/Kelurahan Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Ukuran Kapal Size of fishing vessel	: 9 GT
Tipe Kapal Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
Tanggal Inspeksi Inspection date	: 3 Desember 2024 3 December 2024
Jenis Produk Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
Pemeringkatan Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di Issued in	: Jakarta
Pada tanggal Date	: 17 Desember 2024 17 December 2024
Berlaku sampai Valid until	: 17 Desember 2026 17 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240049

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> Fishing Vessel	: KM. Nelayan 2017 956
<u>Alamat</u> Address	: Jl. Buke Panai, RT. 000/RW. 000, Desa Bongo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
<u>Ukuran Kapal</u> Size of fishing vessel	: 25 GT
<u>Tipe Kapal</u> Type of fishing vessel	: Kapal Penangkap Fishing Vessel
<u>Tanggal Inspeksi</u> Inspection date	: 12 Desember 2024 12 December 2024
<u>Jenis Produk</u> Commodity	: Tuna Segar Fresh Tuna
<u>Pemeringkatan</u> Grade	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Date : 30 December 2024
Berlaku sampai : 30 Desember 2026
Valid until : 30 December 2026

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
*Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency*

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 75 - 240048

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan
Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector
menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: KM. Gorontalo 13
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Jln. Trans Sulawesi, Rt.000/RW.000, Desa Hijangobotu, Kec. Kabila Bone, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 6 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: Kapal Penangkap <i>Fishing Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: 12 Desember 2024 12 December 2024
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: Tuna Segar <i>Fresh Tuna</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in
Pada tanggal : 30 Desember 2024
Date
Berlaku sampai : 30 Desember 2026
Valid until

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini

**Lampiran 5. Data Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Tahun 2024**

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP)
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE TO SUPPORT BUSINESS ACTIVITIES
PB-UMKU:912010280350800020002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:
The Government of the Republic of Indonesia has accepted and issued the Business License to Support Business Activities, to the company named below:

1. Nama Pelaku Usaha <i>Company Name</i>	: ANDINI PASTEL
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Registration Number</i>	: 9120102803508
3. Alamat Kantor <i>Office Address</i>	: Jl. Lupoyo, Desa/Kelurahan Lupoyo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Kode Pos <i>Postal code</i>	:
4. Status Penanaman Modal <i>Investment Status</i>	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) <i>Domestic Direct Investment</i>
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) <i>Indonesia Standard Industrial Classification Code</i>	: 10750 - Industri Makanan dan Masakan Olahan <i>10750 - Processed Food and Dish Industry</i>
6. Lokasi Usaha <i>Business Location</i>	: Jalan Tohetutu Desa Lupoyo Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo Desa/Kelurahan Lupoyo, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Kode Pos <i>Postal code</i>	: 96181

Telah memenuhi persyaratan berikut :

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSrE-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 912010280350800020002

- | | |
|---|---|
| 1. Nomor Seri
Serial Number | : P.: 00036709 |
| 2. Nomor SKP
GMP Certificate Number | : 34641/75/SKP/KR/XII/2024 |
| 3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant | : LAINNYA ANDINI PASTEL |
| 4. Jenis Produk
Type of Product(s) | : Stik Lele
Catfish Stick |
| 5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps | : Penerimaan, Pengolahan, Penggorengan, Penirisan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Processing, Frying, Draining,
Packing/Labeling, Storing, Storing |
| 6. Peringkat
Ranking | : B |

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in

: Jakarta

Tanggal
Date

: 05 Desember 2024
05 December 2024

Bertaku sampai dengan
Valid until

: 05 Desember 2026
05 December 2026

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Matras
Sertifikasi
Elektronik



Lampiran 5. Data Sertifikat Keterangan Hasil Surveiln (SKHS) Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO
JALAN ACHMAD NADJAMUDDIN NOMOR 20 GORONTALO 96128
TELEPON (0435) 824071, FAKSIMILE (0435) 824071
LAMARAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK skipm.gorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILAN
No. 10/34.0/SKV/11/24

DIBERIKAN KEPADA

CV. GORONTALO FISHERY
Desa Datahu, Kec. Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo - Indonesia
Telp/Fax. 081223964803/

Dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Laporan Hasil Surveiln
No. B. 409 /SKIPM.GTO/KI.440/X/2024
yang mencakup penerapan GMP, SSOP dan HACCP
serta berhak mendapatkan pelayanan
Health Certificate (HC) untuk jenis produk :

- 1. Fresh Demersal Fish**
- 2. Fresh Pelagic Fish**
- 3. Fresh Tuna**

Surat Keterangan Hasil Surveiln ini berlaku sampai terbitnya Surat Keterangan
Hasil Surveiln Periode Berikutnya.
Pelaksanaan Surveiln berikutnya dijadwalkan tanggal 15 Desember 2024 s/d 25 Desember
2024.

Gorontalo, 25 November 2024
Kepala Stasiun KIPM Gorontalo,


Andir S.Pi, M. Si
97303021999031003





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO**

JALAN ACHMAD NADJAMUDDIN NOMOR 20 GORONTALO 96128
TELEPON (0435) 824071, FAKSIMILE (0435) 824071
LAMAR www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK skipm.gorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILAN

No. 8/34.0/SKV/10/24

DIBERIKAN KEPADA

UD. FARIS

Dusun Pasar Baru, Kel. Moluo, Kec. Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo,
Gorontalo - Indonesia
Telp/Fax. 081244487568/-

Dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Laporan Hasil Surveilance
No.

yang mencakup penerapan GMP, SSOP dan HACCP
serta berhak mendapatkan pelayanan
Health Certificate (HC) untuk jenis produk :

- 1. Fresh Demersal Fish**
- 2. Fresh Pelagic Fish**

Surat Keterangan Hasil Surveilance ini berlaku sampai terbitnya Surat Keterangan
Hasil Surveilance Periode Berikutnya.
Pelaksanaan Surveilance berikutnya dijadwalkan tanggal 10 Desember 2024 s/d 20 Desember
2024.

Gorontalo, 23 Oktober 2024
Kepada Kepala KIPM Gorontalo,

Abdul Kadir S.Pi, M. Si
NIP. 021999031003



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO**

JALAN ACHMAD NADJAMUDDIN NOMOR 20 GORONTALO 96128
TELEPON (0435) 824071, FAKSIMILE (0435) 824071
LAMARAN www.kkp.go.id, SURAT ELEKTRONIK skipm.gorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL SURVEILAN

No. 9/34.0/SKV/10/24

DIBERIKAN KEPADA

CV. BERKAT ADIDAYA

Jl. Satsuit Tubun No. 18 Kel. Tenda Kec. Hulontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo -
Indonesia

Telp/Fax. (62) 8128226 476/-

Dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai Laporan Hasil Surveilans
No. B. /SKIPM.GTO/KI.410/IX/2024
yang mencakup penerapan GMP, SSOP dan HACCP
serta berhak mendapatkan pelayanan
Health Certificate (HC) untuk jenis produk :

1. Frozen Milkfish
2. Frozen Tuna
3. Fresh Tuna

Surat Keterangan Hasil Surveilans ini berlaku sampai terbitnya Surat Keterangan
Hasil Surveilans Periode Berikutnya.
Pelaksanaan Surveilans berikutnya dijadwalkan tanggal 01 Desember 2024 s/d 05 November
2024.



Gorontalo, 31 Oktober 2024
Kepala Stasiun KIPM Gorontalo,

[Signature]
Kadir S.Pi, M. Si
NIP. 197303021999031003